

## RPSEP-63

# KOMUNIKASI ANGGOTA DPR DAN KONSTITUEN; MENJALIN RELASI BUKAN TRANSAKSI

Yanti Hermawati  
FISIP-Universitas Terbuka  
[herma@ut.ac.id](mailto:herma@ut.ac.id)

### *Abstract*

*The working members of parliament in a democracy is to serve constituents, namely by representing the interests of constituents in the legislature. Constituents elect members of parliament as deputy with great hope that members of parliament can provide solutions to the problems of constituents. To realize this was required effective and sustainable communication between members of parliament and their constituents. As an institution, the parliament has provided a budget that does little for members of parliament and constituent communications. But in fact, 75,8 percent constituent claimed to have never visited by members of parliament. In fact, participation in determining the constituents of public policies in the house of representatives is necessary. A member of parliament as the representative of the people who having the function of legislation, the determination of the state budget, and function of supervision, have a duty to select the aspiration and the participation of a constituent in his political activity in the house of representatives. Effective communication and continuous between members of parliament and a constituent indispensable to bring democracy actually, of the people, for the people, and by the people. This article will explain his about communication members of parliament and constituents to connect relational as an effort to embody democracy in Indonesia*

*Keywords: democracy, communication, members of parliament, constituents, relational*

### **Abstrak**

*Kerja anggota DPR dalam demokrasi adalah melayani konstituen, yaitu dengan mewakili kepentingan konstituen di lembaga legislatif. Konstituen memilih Anggota DPR sebagai wakilnya dengan harapan besar bahwa Anggota DPR dapat memberikan solusi atas berbagai masalah konstituen. Untuk mewujudkan hal ini dibutuhkan komunikasi yang efektif dan berkesinambungan antara anggota DPR dan konstituennya. Secara institusional, DPR telah menyediakan anggaran yang tidak sedikit untuk komunikasi anggota DPR dan konstituen. Namun pada kenyataannya, 75,8 persen konstituen merasa tidak pernah dikunjungi oleh anggota DPR. Padahal, partisipasi konstituen dalam menentukan kebijakan-kebijakan publik di DPR sangat diperlukan. Anggota DPR, sebagai wakil rakyat yang memiliki fungsi legislasi, penetapan APBN, dan fungsi pengawasan, memiliki tugas untuk menjangkau aspirasi dan melibatkan partisipasi konstituen dalam aktivitas politiknya di DPR. Komunikasi yang efektif dan berkesinambungan antara anggota DPR dan konstituen sangat diperlukan guna*

*mewujudkan demokrasi yang sebenarnya, dari rakyat, untuk rakyat, dan oleh rakyat. Artikel ini akan memaparkan tentang komunikasi anggota DPR dan konstituen untuk menjalin hubungan relasional sebagai upaya untuk mewujudkan demokrasi di Indonesia*

*Kata Kunci: demokrasi, komunikasi, anggota DPR, konstituen, relasional*

## **PENDAHULUAN**

Anggota DPR yang memiliki fungsi legislasi, penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dan fungsi pengawasan berkewajiban untuk melibatkan aspirasi dan partisipasi konstituen dalam aktivitas politiknya di DPR. Upaya yang dapat dilakukan anggota DPR untuk mendorong partisipasi politik tersebut diantaranya adalah melalui komunikasi yang baik antara anggota DPR dan konstituennya. Berbagai media yang dapat menjangkau konstituen perlu dipilih oleh anggota DPR untuk memaksimalkan komunikasinya dengan konstituen.

Laksono (2009) menjelaskan beberapa poin yang direkomendasikan untuk perbaikan kinerja anggota DPR, diantaranya adalah aspirasi masyarakat/konstituen pada saat anggota melakukan pengawasan ke daerah tertentu (kunjungan kerja) sering kali tidak ditindaklanjuti sebagaimana mestinya. Karena itu, diperlukan adanya komunikasi yang lebih intensif antara anggota DPR dan konstituen, dimana konstituen memiliki peluang yang lebih besar untuk menyampaikan aspirasinya kepada wakilnya di DPR.

Kepala Departemen Politik dan Hubungan Internasional *Centre for Strategic and International Studies* (CSIS), Philips Vermonte (tribunnews.com) menyatakan bahwa dari hasil survei CSIS dapat diketahui bahwa 80 persen konsituen tidak mengenal anggota DPR dari daerah pemilihannya. Vermonte (tribunnews.com) menambahkan bahwa lebih dari tiga perempat warga (75,8 persen) konstituen tidak pernah dikunjungi wakil rakyatnya. Hal ini didukung oleh data dari Bapenas ([www.bappenas.go.id](http://www.bappenas.go.id)) yang menunjukkan bahwa konstituen lebih banyak menyatakan tidak dihubungi oleh anggota DPR ketika ada kunjungan kerja ke daerahnya.

Tabel 1  
Kunjungan ke Konstituen

| Pernah dihubungi DPR/D | 2001 | 2002 | 2003 |
|------------------------|------|------|------|
| Dihubungi              | 7%   | 4%   | 2%   |
| Tidak Dihubungi        | 85%  | 87%  | 95%  |
| Tidak Tahu             | 8%   | 8%   | 2%   |
| Tidak Menjawab         | 1%   | 1%   | 1%   |

Sumber: *Media Indonesia* 6 Februari 2004; IFES 2001, 2002, 2003 ([www.bappenas.go.id](http://www.bappenas.go.id))

## **AMANAH KONSTITUEN UNTUK ANGGOTA DPR**

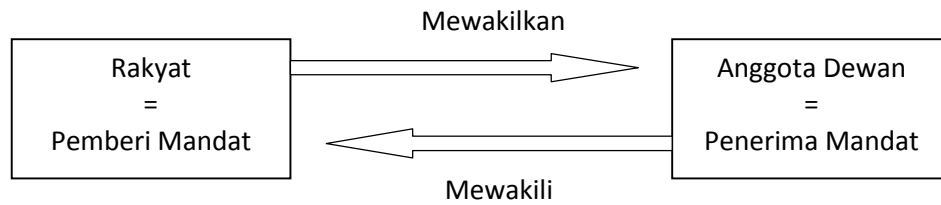
Anggota DPR adalah wakil rakyat dan pemegang amanah konstituen. Konstituen adalah (Arinanto dan Fatmawati, 2009) pemilih pada daerah pemilihan anggota DPR, baik itu pemilih dari masyarakat umum, simpatisan, maupun anggota partai dengan tingkat keutamaan yang berbeda satu dengan yang lainnya. Namun berdasarkan nomenklatur anggota DPR, yang dimaksud konstituen adalah seluruh warga di daerah pemilihan baik yang memilihnya, maupun tidak. Hal ini sesuai dengan pandangan Rozaki (2006) yang menyatakan bahwa konstituen merupakan seluruh warga di daerah pemilihan darimana dia dipilih dalam proses pemilihan umum, tanpa lagi mengidentifikasi siapa pendukung dan penolaknya.

Sebagai pengemban amanah konstituen, Anggota DPR sudah selayaknya menjalin hubungan dengan konstituen secara intensif, bukan hanya pada masa kampanye saja. Berbagai media yang dapat menjangkau konstituen seharusnya dapat dimanfaatkan oleh anggota DPR. Selain kunjungan kerja (kunker) ke dapil (daerah pemilihan), anggota DPR pun perlu memaksimalkan media cetak maupun elektronik yang mampu menjangkau konstituen.

Anggota DPR menjalankan fungsinya dalam kerangka representasi rakyat sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang No. 27 tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD. Dalam pasal 71 huruf s disebutkan bahwa DPR mempunyai tugas dan wewenang untuk menyerap, menghimpun, menampung, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat. Dalam Tata Tertib DPR RI 2009-2014 ([www.dpr.go.id](http://www.dpr.go.id)) dijelaskan bahwa aspirasi merupakan keinginan kuat dari masyarakat yang disampaikan kepada DPR RI dalam bentuk pernyataan sikap, pendapat, harapan, kritikan, masukan dan saran terkait dengan tugas, fungsi dan kewenangan DPR RI.

Anggota DPR dan konstituen memiliki tanggung jawab yang besar dalam mewujudkan pemerintahan yang baik di Indonesia. Anggota DPR sebagai penerima mandat dan rakyat sebagai pemberi mandat, keduanya sama-sama berkontribusi dalam mewujudkan demokrasi di Indonesia.

Bagan 1  
Representasi Anggota DPR



Sumber: Arinanto, Satya dan Fatmawati. 2009. Buku Panduan Tentang Menjalin Hubungan Konstituen dan Keterwakilan. Jakarta: Sekretariat Jenderal DPR RI dan UNDP

Menurut Arinanto dan Fatmawati (2009), yang dimaksud keterwakilan adalah keterwakilan secara formal maupun keterwakilan secara substantif. Keterwakilan secara formal yaitu keterwakilan yang dimandangi dari segi kehadiran fisik di DPR. Adapun keterwakilan substantif adalah perwakilan atas dasar aspirasi atau ide. Arinanto dan Fatmawati (2009) pun menjelaskan bahwa secara substansial keterwakilan rakyat dapat tersalurkan apabila nilai, aspirasi, dan pendapat rakyat yang diwakili benar-benar diperjuangkan atau bahkan berhasil menjadi bagian dari kebijakan yang ditetapkan oleh DPR.

### **KOMUNIKASI ANGGOTA DPR DAN KONSTITUEN**

Seseorang tidak dapat menjadi anggota DPR apabila tidak dipilih oleh konstituen. "Anggota DPR dipilih, bukan dilotre" demikian salah satu penggalan lirik lagu dari Iwan Fals yang barangkali perlu ditanamkan dalam ingatan para anggota DPR. Setelah duduk di kursi DPR, seharusnya anggota DPR tidak lupa untuk terus menjalin komunikasi dengan konstituennya. Komunikasi yang dibangun pun perlu dilakukan secara intensif dan berkesinambungan. Komunikasi yang hanya dilakukan pada momentum politik, dapat menghadirkan pandangan negatif dari konstituen kepada anggota DPR. Komunikasi yang tidak terjalin dengan baik pun, dapat menjadi kendala dalam menyerap aspirasi dan kesadaran konstituen terhadap pentingnya terlibat dalam berbagai kebijakan politik di DPR. Hal ini dijelaskan oleh Kepala Departemen Politik dan Hubungan Internasional *Centre for Strategic and International Studies* (CSIS), Philips Vermonte (tribunnews.com) bahwa komunikasi yang tidak efektif dapat pula menghadirkan persepsi negatif dari konstituen terhadap wakilnya di DPR.

*National Democratic Institute* (NDI) ([www.ndi.org](http://www.ndi.org)) menjelaskan bahwa komunikasi yang terjalin antara anggota DPR dan konstituen dapat memberikan manfaat yang sangat besar dalam meningkatkan partisipasi politik konstituen, diantaranya;

*Pertama*, anggota DPR yang secara aktif melibatkan konstituennya dapat membantu menciptakan hubungan antara warga negara dengan pemerintah mereka. Dengan terlibat dan mendengarkan apa yang menjadi masalah publik, anggota DPR lebih terbekali untuk merancang atau mengubah kebijakan-kebijakan yang merespon kebutuhan manusia yang nyata.

*Kedua*, keterlibatan yang aktif dengan konstituen memberi sebuah wajah yang lebih jelas kepada anggota DPR. Meskipun anggota DPR tidak selalu dapat memberikan solusi atas permasalahan konstituen, setidaknya komunikasi yang terjalin menunjukkan adanya upaya anggota DPR untuk membantu konstituen dalam memecahkan permasalahannya. Hal ini dapat membangun kembali kepercayaan publik kepada anggota DPR dan lembaga legislatif yang sepertinya sudah mulai luntur.

*Ketiga*, komunikasi yang terjalin baik antara anggota DPR dan konstituen, dapat membantu memobilisasi partisipasi konstituen dalam urusan-urusan publik. Dengan memperluas lingkaran warga yang melibatkan diri dalam kebijakan-kebijakan publik dan keputusan-keputusan publik, anggota DPR dapat memerangi sikap apatis dan membantu membuat demokrasi berjalan melalui pemecahan masalah yang praktis.

Adapun komunikasi dengan konstituen dapat dilakukan dengan beberapa cara (Arinanti dan Fatmawati, 2009), yaitu; 1) *person to person*, 2) *person to many persons*, 3) *many persons to many persons*.

a. *Person to Person*

Komunikasi dengan cara *person to person*, dilakukan secara individual. Individu ke Individu. Anggota DPR dapat berkomunikasi dengan konstituen tertentu, terutama yang dianggap representatif secara individual di masyarakat. Komunikasi dapat dilakukan melalui telepon, pesan pendek, surat menyurat, *e-mail*, atau dengan cara mengirimkan selebaran ke rumah-rumah yang memuat tentang beragam informasi yang terkait dengan kebijakan yang sedang dibahas oleh anggota DPR.

Selain itu, komunikasi pun dapat dilakukan secara tatap muka langsung dengan konstituen. Komunikasi tatap muka dapat dilakukan pada saat kunjungan kerja kepada konstituen, maupun dengan cara konstituen mendatangi anggota di gedung DPR, rumah aspirasi,

atau pun pada momentum tertentu yang memungkinkan konstituen bertemu dengan anggota DPR. Terkait dengan rumah aspirasi, beberapa anggota DPR periode 2009-2014 sudah mewujudkannya, diantaranya adalah Budiman Sujatmiko, Aria Bima, Mahfudz Shiddiq, Aziz Syamsuddin, Roestanto Wahidi, dan lain sebagainya.

Dalam tata tertib DPR 2009-2014 ([www.dpr.go.id](http://www.dpr.go.id)), dijelaskan bahwa anggota DPR dapat melakukan kunjungan kerja ke daerah pemilihan paling sedikit 1 (satu) kali setiap 2 (dua) bulan atau 6 (enam) kali dalam 1 (satu) tahun, dengan waktu paling lama 5 (lima) hari, yang dilaksanakan di luar masa reses dan di luar sidang-sidang DPR. Pada saat kunjungan, anggota DPR harus dapat memanfaatkan pertemuannya dengan konstituen sebagai ajang untuk menjangkau aspirasi rakyat sebagai pemberi mandat atas dirinya di DPR.

Marlinawati ([renimarlinawati.com](http://renimarlinawati.com)), anggota DPR RI 2009-2019, menjelaskan bahwa kunjungan kerja ke konstituen, bukanlah ajang menabur janji. Menurutnya, kunjungan kerja merupakan ajang silaturahmi dan melakukan pendidikan politik kepada konstituen. Konstituen perlu memahami pentingnya berpartisipasi dalam menentukan kebijakan-kebijakan publik di DPR. Ia pun menambahkan bahwa segala aspirasi yang didapatkan pada kunjungan tersebut selanjutnya harus ditindaklanjuti oleh anggota DPR. Apalagi selama ini menurut Laksono (2009) aspirasi masyarakat/konstituen pada saat anggota melakukan pengawasan ke daerah tertentu (kunjungan kerja) sering kali tidak ditindaklanjuti sebagaimana mestinya.

#### b. *Person To Many Persons*

Komunikasi *person to many persons* adalah komunikasi yang dilakukan kepada konstituen dalam jumlah yang banyak. Komunikasi ini dapat dilakukan dengan cara membuat laporan hasil kerja secara periodik, melakukan sosialisasi RUU di dapilnya, rapat umum dengan konstituen saat kunjungan kerja, diskusi publik, atau dengan memberikan berbagai informasi kepada konstituennya melalui media massa. Selain itu, media komunikasi yang dapat dimanfaatkan adalah media sosial. Anggota DPR dapat memublikasikan berbagai informasi yang terkait dengan aktivitas politiknya melalui majalah khusus bagi konstituennya, website miliknya, twitter, facebook, dan media sosial lainnya yang mudah diakses oleh konstituen.

Berikut ini adalah contoh majalah milik anggota DPR yang secara rutin dibagikan kepada konstituennya.

Gambar 1  
Majalah Aspirasi Milik Ramadhan Pohan (Anggota DPR 2009-2014)



<http://www.ramadhanpohan.com/majalah/tabloid-aspirasi>

Beberapa anggota DPR periode 2009-2014 pun memiliki website pribadi anggota DPR RI yang dapat diakses oleh siapa saja termasuk konstituennya seperti berikut ini.

Tabel 2  
Daftar Alamat Website Milik Beberapa Anggota DPR RI periode 2009-2014

| No. | Nama Anggota DPR         | Alamat web            | Keterangan                           |
|-----|--------------------------|-----------------------|--------------------------------------|
| 1   | Aria Bima                | ariabima.com          | Anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan |
| 2   | Arif Budimanta           | budimanta.com         | Anggota DPR-RI Fraksi PDI Perjuangan |
| 3   | Budiman Sudjatmiko       | budimansudjatmiko.net | Anggota DPR Fraksi PDIP              |
| 4   | Fahri Hamzah             | fahrihamzah.com       | Anggota DPR RI Fraksi PKS            |
| 5   | Fayakhun Andriadi        | fayakhun.com          | Anggota DPR RI Fraksi Golkar         |
| 6   | Ganjar Pranowo           | masganjar.com         | Anggota DPR Fraksi PDIP              |
| 7   | Mahfudz Sidiq            | mahfudziddiq.com      | Anggota DPR RI Fraksi PKS            |
| 8   | Mohammad Ichlas El Qudsi | michel-elqudsi.com    | Anggota DPR RI Fraksi PAN            |
| 9   | Nurul Arifin             | nurularifin.com       | Anggota DPR RI Fraksi Golkar         |
| 10  | Priyo Budi Santoso       | priyobudisantoso.com  | Wakil Ketua DPR RI                   |
| 11  | Ramadhan Pohan           | ramadhanpohan.com     | Anggota DPR RI Fraksi Demokrat       |
| 12  | Reni Marlinawati         | renimarlinawati.com   | Anggota DPR RI Fraksi PPP            |
| 13  | Teguh Juarno             | teguhjuwarno.com      | Anggota DPR RI Fraksi PAN            |

Sumber: Hasil Pengamatan 2014

Beragam media komunikasi tersebut dapat dimanfaatkan oleh anggota DPR untuk berkomunikasi dengan konstituennya. Demikian pula sebaliknya, untuk meningkatkan kinerja

anggota DPR, sebaiknya konstituen memanfaatkan pula media komunikasi yang disediakan oleh anggota DPR sebagai wakilnya di DPR.

c. *Many Persons To Many Persons.*

Komunikasi *many persons to many persons*, merupakan komunikasi antara anggota-anggota DPR dengan konstituen dalam jumlah banyak. Komunikasi ini dilakukan terkait dengan hubungan kerja antara sesama anggota DPR dalam melaksanakan fungsinya di DPR.

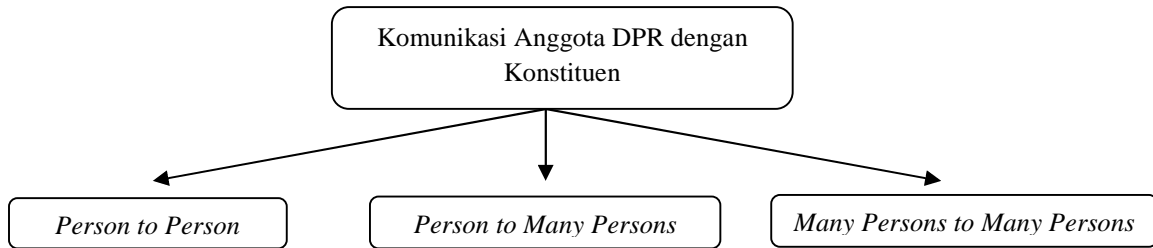
Komunikasi ini dapat dilakukan dengan cara bekerja sama dengan anggota DPR lainnya. Kerja sama antara sesama anggota DPR di alat kelengkapan DPR, maupun dengan sesama anggota DPR dari dapil yang sama, meskipun fraksinya berbeda. Anggota DPR tersebut dapat bersama-sama menemui konstituen atau melalui media massa untuk menyampaikan informasi yang sedang hangat dibicarakan atau dibutuhkan oleh masyarakat. Misalnya, memberikan keterangan kepada konstituen tentang pelaksanaan fungsi pengawasan DPR yang sudah dilakukan kepada pemerintah melalui media massa.

Selain itu, DPR pun memiliki media komunikasi yang dapat dimanfaatkan oleh anggota DPR, diantaranya yaitu: 1) *majalah Parlementaria*, menyajikan berbagai aktivitas anggota DPR yang dapat diperoleh di gedung DPR, di terminal 1 dan 2 Bandara Soekarno Hatta, atau diakses majalah tersebut secara digital di website DPR RI ([www.dpr.go.id/id/serba-serbi/majalah-parlementaria](http://www.dpr.go.id/id/serba-serbi/majalah-parlementaria)). Melalui majalah ini, konstituen pun dapat menyampaikan aspirasinya, yaitu dengan mengirimkan surat ke alamat redaksi Majalah Parlementaria. 2) *TV Parlemen*, menyajikan siaran langsung rapat paripurna, peliputan kegiatan rapat-rapat komisi, dan alat kelengkapan dewan lainnya, serta memproduksi program acara dialog/*talkshow*. Siaran TV Parlemen dapat dinikmati melalui jaringan TV Plasma di lingkungan gedung DPR RI Senayan Jakarta dan *live streaming* melalui situs [www.dpr.go.id](http://www.dpr.go.id) dan [www.mpr.go.id](http://www.mpr.go.id) khusus untuk acara siaran langsung sidang MPR RI, juga jaringan televisi nasional yang *me-relay* siaran TV Parlemen (<http://www.dpr.go.id/id/serba-serbi/tv-parlemen>). 3) *Website* milik DPR RI ([www.dpr.go.id](http://www.dpr.go.id)). Dalam website DPR RI terdapat kolom layanan masyarakat yang berisi kolom “pengaduan masyarakat” dan kolom “sms aspirasi” yang disediakan untuk konstituen dan masyarakat umum. Aspirasi dan pengaduan yang disampaikan ke DPR dapat dilakukan secara online, melalui surat, atau secara langsung dengan mendatangi gedung DPR.



## Bagan 2

### Cara Komunikasi Anggota DPR dengan Konstituen



Sumber: Arinanto, Satya dan Fatmawati. 2009. Buku Panduan Tentang Menjalin Hubungan Konstituen dan Keterwakilan. Jakarta: Sekretariat Jenderal DPR RI dan UNDP

### **MENJALIN RELASI BUKAN TRANSAKSI**

Transaksi yang dimaksud dalam artikel ini adalah hubungan yang didasarkan pada proses transaksi dagang (jual beli). Menurut Ali (2013) hubungan transaksional adalah hubungan dengan proses transaksi dan pertukaran (*exchanges process*) yang mendasarkan diri pada pertimbangan ekonomis-rasional. Ali (2013) menjelaskan bahwa kata transaksional sejatinya memang netral dan tidak bias nilai-nilai tertentu, namun kata transaksional cenderung dipersepsi 'negatif' terutama jika dikaitkan dengan aktivitas politik. Konstituen bersedia bertemu anggota DPR jika dibayar atau ada imbalan, seolah-olah tidak ada kepentingan konstituen dalam pertemuan dengan anggota DPR. Padahal, sejatinya anggota DPR dan konstituen sama-sama menyadari bahwa keduanya memiliki hubungan yang sangat erat. Rakyat sebagai pemberi mandat dan anggota dewan sebagai penerima mandat. Keduanya harus bekerja sama dalam mewujudkan demokrasi di Indonesia.

Komunikasi yang terjalin secara transaksional, sepertinya memang mudah untuk dilakukan, cukup dengan memberikan bantuan materi kepada masyarakat atau konstituen, anggota DPR dapat dengan mudah mengumpulkan konstituen dalam suatu pertemuan. Komunikasi memang terjalin saat itu, namun hubungan yang terjalin dengan konstituen menjadi kurang kokoh. Masyarakat akan memiliki penilaian yang berbeda kepada anggota DPR yang

tidak melakukan hal serupa sehingga akhirnya materilah yang menjadi tolak ukur keberhasilan komunikasi yang terjadi antara anggota DPR dan konstituen.

Kepala Departemen Politik dan Hubungan Internasional *Centre for Strategic and International Studies* (CSIS), Philips Vermonte (tribunnews.com) menjelaskan bahwa biaya komunikasi antara anggota DPR dan konstituen menjadi mahal ketika komunikasi yang dibangun lebih bersifat transaksional. Konstituen bersedia menemui anggota DPR ketika mendapat bayaran untuk ini. Padahal, selain bayaran materi, atau bantuan sosial yang diberikan kepada masyarakat, ada unsur lain yang lebih penting dalam komunikasi antara anggota DPR dan konstituen, yaitu terbentuknya kesadaran politik dari konstituen untuk bersama-sama dengan anggota DPR dalam mewujudkan demokrasi di Indonesia.

Anggota DPR adalah wakil rakyat, dan konstituen sebagai rakyat yang kepentingannya diwakili oleh anggota DPR tentunya perlu melakukan pengawasan atas kinerja anggota DPR tersebut. Adnan Pandu Praja, salah seorang pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2011-2015 (nasional.kompas.com) menyatakan bahwa hubungan dialogis yang semakin intensif antara konstituen dan para anggota DPR diyakini dapat mempersempit peluang partai politik dalam mengooptasi anggota DPR, sehingga anggota DPR dapat benar-benar menjadi wakil rakyat bukan sekedar wakil partai.

Hubungan yang terjalin antara anggota DPR dan konstituen hendaknya bersifat jangka panjang, bukan hanya pada momentum pemilihan umum saja. Dalam pola relasional, Anggota DPR menyadari bahwa konstituen memiliki peran penting dalam berbagai aktivitasnya di DPR. Demikian pula sebaliknya, konstituen pun menyadari pentingnya berperan serta dalam pengambilan kebijakan-kebijakan publik di DPR melalui anggota DPR. Relasi seperti inilah yang selayaknya dibangun dalam komunikasi anggota DPR dan konstituen, Bukan komunikasi bermuatan transaksi “dagang”.

## **KESIMPULAN**

Komunikasi anggota DPR dan konstituen dapat memberikan banyak manfaat, diantaranya dapat menciptakan hubungan antara warga negara dengan pemerintah mereka serta dapat membangun kembali kepercayaan publik kepada anggota DPR dan lembaga legislatif yang sepertinya sudah mulai luntur. Melalui komunikasi yang intensif, anggota DPR pun dapat membantu memobilisasi partisipasi konstituen dalam urusan-urusan publik. Komunikasi antara

anggota DPR dan konstituen dapat dilakukan dengan cara *person to person, person to many persons, many persons to many persons*. Beragam media pun dapat dipilih sesuai dengan kebutuhan dan keterjangkauan akses bagi konstituen, misalnya melalui tatap muka saat kunjungan kerja ke dapil, melalui majalah untuk konstituen, website, akun anggota DPR di media sosial, atau melalui website resmi milik DPR.

Komunikasi yang dilakukan antara anggota DPR dan konstituen hendaknya bertujuan untuk membangun relasi antara rakyat dan wakil rakyat selaku pemberi mandat dan penerima mandat. Keduanya saling membutuhkan dan menyadari pentingnya peran masing-masing. Komunikasi hendaknya tidak hanya terjalin di momentum pemilihan umum saja dan bersifat transaksional. Namun komunikasi hendaknya terus terjalin sepanjang perjalanan anggota DPR mengemban amanah konstituen. Komunikasi terus dilakukan untuk membangun relasi antara anggota DPR dan konstituen sehingga tidak ada jarak yang dapat menghambat penyerapan aspirasi dari konstituen untuk wakilnya di DPR.

## DAFTAR PUSTAKA

### *Buku:*

Ali, Eko Maulana. 2013. *Kepemimpinan Integratif dalam Konteks Good Governance*. Jakarta: Multicerdas Publishing.

Arinanto, Satya dan Fatmawati. 2009. *Buku Panduan Tentang Menjalin Hubungan Konstituen dan Keterwakilan*. Jakarta: Sekretariat Jenderal DPR RI dan UNDP

Laksono, Agung. 2009. *Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Pasca Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Jurnal Majelis. ISSN 2085-4862. Volume 1. Nomor 1. Agustus 2009. Sekretariat Jenderal MPR RI

Rozaki, Abdur., dkk. 2006. *Kaukus Parlemen Bersih: Media Pembelajaran Parlemen Lokal*. Yogyakarta: Konsorsium Kaukus Parlemen Bersih DIY

### *Sumber Online:*

Adnan Pandu Praja. Indeks Kinerja Anggota DPR. <http://nasional.kompas.com/read/2014/10/14/15501731/Indeks.Kinerja.Anggota.DPR> diakses tanggal 14 Oktober 2014

DPR RI. Tata Tertib. <http://www.dpr.go.id/id/tentang-dpr/tata-tertib/bab-14> diakses tanggal 2 Oktober 2014

Bappenas. *Akuntabilitas Wakil Rakyat Masih Rendah: Perlu Penyusunan Indikator Demokrasi dan Perbaikan Perundang-Undangan.*  
[http://www.bappenas.go.id/files/1413/5228/2735/1akuntabilitas-wakil-rakyat-masih-rendah-perlu-penyusunan-indikator-demokrasi-dan-perbaikan-perundang-undangan\\_20081123185136\\_1261\\_0.pdf](http://www.bappenas.go.id/files/1413/5228/2735/1akuntabilitas-wakil-rakyat-masih-rendah-perlu-penyusunan-indikator-demokrasi-dan-perbaikan-perundang-undangan_20081123185136_1261_0.pdf) diakses tanggal 2 Oktober 2014

National Democratic Institut, *Hubungan Dengan Konstituen,*  
[https://www.ndi.org/files/Hubungan Dengan Konstituen BAH.pdf](https://www.ndi.org/files/Hubungan_Dengan_Konstituen_BAH.pdf) diakses tanggal 30 September 2014

Tribunnews.com, *Komunikasi Anggota DPR dan Konstituen Bersifat Transaksional*  
<http://www.tribunnews.com/pemilu-2014/2014/03/19/komunikasi-anggota-dpr-dan-konstituen-bersifat-transaksional> diakses tanggal 30 September 2014

Gardu Aspirasi Ramadhan Pohan. <http://www.ramadhanpohan.com/majalah/tabloid-aspirasi> diakses tanggal 09 Oktober 2014

Reni Marlinawati, <http://www.renimarlinawati.com/index.php/kabar-dapil/876-reni-reses-adalah-sarana-pendidikan-politik-masyarakat> diakses tanggal 2 Oktober 2014